

## KRITIK BUKU TEKS & KONTROVERSI PENYIMPANGAN PRESIDEN SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Ninda Kiyani Maharani<sup>1</sup>, Fauzan Hilmani<sup>2</sup>, Farel Abdiel Fayyadh<sup>3</sup>, Rikza Fauzan<sup>4</sup>  
[2288210006@untirta.ac.id](mailto:2288210006@untirta.ac.id), [2288210049@untirta.ac.id](mailto:2288210049@untirta.ac.id), [hilmanifauzan@gmail.com](mailto:hilmanifauzan@gmail.com),  
[rikza.fauzan@untirta.ac.id](mailto:rikza.fauzan@untirta.ac.id)

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Sultan Ageng Tirtayasa

### ABSTRAK

Buku Teks merupakan suatu pedoman bagi pembelajaran terkait pencerdasan kehidupan bangsa, dalam hal ini sejarah merupakan suatu kajian yang cukup penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Demokrasi terpimpin merupakan suatu rancangan yang dimuat oleh presiden soekarno selaku bapak revolusi bangsa Indonesia. Namun dinamika suatu bangsa tentu memiliki warnanya tersendiri. Penulisan rangkaian kata ini menggunakan metode studi kepustakaan dan narasi tujuan dalam penulisan tujuan ini adalah mengupas Buku teks sejarah kurikulum 2013 edisi revisi 2016 juga membahas berbagai dinamika penyimpangan yang dilakukan presiden soekarno pada masa demokrasi terpimpin, kemudian berikut merupakan kajian yang membahas demokrasi terpimpin seperti : DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM PEMIKIRAN DAN PRAKTIK POLITIK, Anwar Usman, Segittiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959 – 1965: Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia, dan Lainnya

*Kata Kunci : Demokrasi, Pemikiran dan Politik*

### PENDAHULUAN

Sejarah merupakan suatu istilah dalam pengabdian suatu peristiwa. Mengutip J. Huizinga menganggap sejarah merupakan bentuk intelektual dimana suatu peradaban menceritakan dirinya sendiri mengenai masa lalunya, yang mengindikasikan sebagai suatu sejarah yang kekal oleh waktu Ketika diabadikan lewat penulisan sejarah (Historiografi). Sejarah sendiri memiliki berbagai arti baik dibidang kepentingan bangsa, negara, juga pembelajaran maupun suatu hal yang memiliki cakupan skala barometer cukup penting dalam peradaban manusia. Dalam mengartikan suatu Kontroversial yang menurut (Badudu dan Zein 2001:715) dalam (Alfian 2016:2) kontroversi adalah “ Perbedaan Pendapat; sebuah Penilaian yang berbeda dan menimbulkan suatu paham yang berbeda” hingga disaat yang sama melainkan bukan tanpa alasan, namun memiliki masing – masing dasar yang kuat maka dari itu suatu Sejarah Kontroversi merupakan suatu kajian yang masih berlanjut hingga kajian tersebut memiliki dua atau lebih pendapat yang berbeda (Ahmad, 2010:34) dalam ( Alfian, 2016:2).

Dalam penulisan ini suatu kontroversi yang akan dibahas dalam sejarah adalah tentang Kajian buku teks yang ada juga terdapat sebuah kejahatan yang terjadi di masa lalu pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin sendiri lahir dengan tanda Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, juga menandai demisionernya kabinet Djuanda pada saat itu. Demokrasi Terpimpin lahir salah satunya dari respon Soekarno terhadap pemerintahan Demokrasi Parlementer yang cukup menguras Pemikiran, juga Dinamika Politik, dengan gagasan yang memuat kurang lebihnya 3 hal utama, Kepemimpinan yang terpusat yang dimaksudkan Absolutnya suatu keputusan tanpa adanya intervensi, argumentasi juga ketidaksepahaman, kemudian adanya niatan menyatukan ideologi dan partai dalam kabinet Gotong Royong, juga Dewan Nasional yang menjadi golongan fungsional dari beberapa lapisan masyarakat ( Ma’riyah, 1988) dalam ( H Indrajat , 2016: 2).

Dalam Jurnal ini penulis akan menampilkan beberapa narasi terkait Demokrasi Terpimpin serta Penyimpangan Kontroversi serta analisis yang terdapat dalam Buku Teks Sejarah 2013. Buku Teks sendiri merupakan suatu sumber utama rujukan pembelajaran pada kurikulum 2013 . Bagaimana suatu Buku Teks menjadi Kontroversi juga

Penyimpangan seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada Masa demokrasi Terpimpin berikut akan dinarasikan dalam Penulisan ini

## TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan fokus kajian yang dimuat dalam penulisan ini maka yang digunakan teori Analisis, kemudian Teori Kekuasaan hingga teori penyimpangan Sosial maka Djuraid (2006 :85 - 86) menarasikan unsur 5W+1H lebih rinci, antara lain.

- a) What atau apa, apa dijadikan suatu *title* atau judul dalam menyebutkan suatu hal contohnya dalam hal ini yang di *domain* kan terhadap sejarah maka contohnya adalah “ Peristiwa Rengasdengkol “, “ Peristiwa Tsunami Aceh “, dst.
- b) Where atau di mana, dijadikan suatu peng – artian sebagai rujukan suatu daerah atau posisi peristiwa, ruang lingkup, dan sebagainya yang merujuk terhadap konteks keberadaan.
- c) When atau kapan, when diartikan sebagai rujukan sesuatu terjadi yang berlandaskan kepada waktu
- d) Who atau siapa, siapa dalam hal ini merujuk terhadap istilah seseorang atau subjek yang menjadi suatu bagian didalam sebuah peristiwa
- e) Why atau mengapa, suatu peristiwa tentu memiliki alasan yang menyebabkan peristiwa itu terjadi dan merujuk pada pertanyaan mengapa untuk mendapatkan jawaban suatu alasan
- f) How atau bagaimana, merupakan pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang terjadi, bagaimana proses terjadinya, termasuk akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur - unsur berita meliputi 5W+1H (what, where, when, who, why, how) dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut adiksimba (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana).

Kekuasaan merupakan suatu anugerah yang ada pada masa kini dan di masa lampau, dalam hal ini sebuah kekuasaan bisa diartikan sebagai sesuatu hak yang dapat menjadikan suatu hal menjadi berarti hingga tidak terkemuka, kemudian kekuasaan yang ada pada pemerintahan menurut John Locke terbagi menjadi tiga yaitu :

- a) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang- undang.
- b) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- c) Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Teori Sosial Penyimpangan, Emile Durkheim mengatakan bahwa fungsi perilaku menyimpang memperkuat nilai dan norma dalam masyarakat, tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batas moral. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat, perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial.

## METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka yaitu metode yang digunakan dengan mencari sumber-sumber literatur yang berfokus pada kajian melalui literatur buku, artikel dan jurnal yang relevan dengan penelitian tersebut. Menurut (Purwanto : 2008) Penelitian studi literatur atau studi pustaka memiliki beberapa ciri yaitu: Peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setelah mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang diteliti, peneliti melakukan beberapa kajian untuk dapat dianalisis secara kritis dan mendalam mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan tentang judul tersebut, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui harmonisasi hubungan antara sekolah dengan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Naskah Buku Teks Sejarah SMA Kelas 12 Kurikulum 2013 (Revisi 2016) Demokrasi Terpimpin

#### 1. Menuju Demokrasi Terpimpin

Dalam Buku teks sma kelas 12 kurikulum 2013, menjelaskan tentang awal mula Kehidupan sosial politik indonesia pada masa demokrasi liberal (1950 hingga 1959) belum mencapai kestabilan secara nasional. Dinamika pembangunan bangsa yang terjadi serta tercatat didalam sejarah mengalami berbagai pergolakan yang terjadi pada masa awak kemerdekaan, berbagai pergolakan partai politik yang memiliki pandangan tertentu, kemudian adanya perebutan kekuasaan di irian barat atas integrasi bangsa serta perekonomian Indonesia yang belum mandiri. Kepentingan kelompok partai politik yang lebih diutamakan mengharuskan berbagai kabinet silih berganti karena ketidaksesuaian terhadap beberapa kepentingan. Kemudian silih waktu berganti presiden mencoba landasan untuk menyederhanakan banyaknya partai menjadi kurang dari lima namun pada faktanya tetap menimbulkan beberapa bagian yang tidak stabil dalam integrasi hingga akhirnya narasi Demokrasi Terpimpin Muncul.

Dalam konsepsinya presiden soekarno menyederhanakan sebuah koalisi yang disebut koalisi berkaki empat dengan memuat partai PKI, MASYUMI, NU, serta PNI. Presiden soekarno juga menghendaki dibentuknya dewan nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Lebih jauh presiden soekarno juga menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa indonesia. Untuk itu ia ingin mengganti dengan suatu demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia, yaitu demokrasi terpimpin.

Sistem demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh presiden indonesia pertama, soekarno. Konsep ini menggabungkan antara prinsip demokrasi dan otoriterisme. Dalam sistem ini, pemimpin yang dipilih secara demokratis memiliki wewenang yang luas untuk memimpin negara, namun tetap terdapat kendali dari partai politik atau lembaga lainnya. Konsep ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan stabil untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun, hal ini juga menimbulkan kritik karena potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin. Pada masa pemerintahan soekarno, sistem demokrasi terpimpin diimplementasikan melalui pembentukan dewan nasional yang dipimpin oleh presiden. Namun, setelah orde baru berkuasa, sistem ini digantikan dengan sistem demokrasi pancasila. Meskipun tidak lagi digunakan secara resmi di indonesia, konsep demokrasi terpimpin tetap menjadi pembelajaran berharga bagi negara-negara lain dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan konteksnya.

Selanjutnya yang dilakukan oleh inisiasi presiden soekarno adalah dengan mengambil beberapa lembaga yang bisa dijadikan sebagai rekan disukusi untuk berbagai pengambilan keputusan yang dimiliki, dengan membentuk MPRS, DPAS. Presiden soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 3 juli 1959, presiden soekarno memanggil ketua DPR, Mr. Sartono, perdana menteri ir. Djuanda, para menteri, pimpinan tni, dan anggota dewan nasional (Roeslan Abdoel Gani Dan Moh. Yamin), serta ketua mahkamah agung, mr. Wirjono prodjodikoro, lalu pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno Mengeluarkan sebuah pengumuman yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Beberapa poin isi Dekrit Presiden tersebut dapat menjadi faktor penyebab terjadi nya demokrasi terpimpin yaitu :

- a. Buruknya pelaksanaan Demokrasi Parlementer di Indonesia sebelum tahun 1959 diangkat nya aparatur negara yang mengakibatkan rencana pembangunan negara terhambat.
- b. Kinerja Badan Konstituante yang buruk dalam menyusun Undang-Undang Dasar Baru. Akibat adanya perbedaan kepentingan.

- c. Banyaknya Gerakan Separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara dengan membawa nama daerah nya atau untuk mengambil kekuasaan, sehingga mengancam kesatuan NKRI dan mengancam keamanan negara serta memicu Disintegrasi bangsa.
- d. Pergantian kabinet yang tidak becus mengurus negara dalam Demokrasi parlementer, banyak pekerjaan yang tidak terealisasi.
- e. Persaingan antara PARPOL yang memicu Kebencian, Pertengkaran, Perpecahan yang terjadi pada bangsa Indonesia.

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966 yaitu dikeluarkan nya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena Indonesia pada saat itu mengandalkan Kepemimpinan Presiden Soekarno.

## 2. Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Pada penerapan kembali UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin, maka dimulai juga sistem ekonomi terpimpin yang mengharuskan alat produksi, distribusi penting perlu dikuasai penuh oleh pemerintah. Peranan pemerintah yang semakin mendominasi dengan sikap sentralisasi dan independensi semakin menjadikan pemerintah bekerja ekstra dengan pengaturan ekonomi secara terpimpin. Keadaan pasca kemerdekaan yang mewariskan masalah ekonomi berusaha diperbaiki pada masa ini serta langkah yang dikerjakan dengan terancang nya Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 17 agustus 1959 dengan komando dari presiden soekarno serta pedoman untuk Depernas dapat melaksanakan penugasan penstabilan ekonomi.

Perencanaan kemudian dilakukan dengan mempersiapkan program serta dengan istilah Semesta pembangunan , mempertimbangan , menyesuaikan, serta mengkondisikan dalam berbagai sektor. Dengan menerapkan seni dalam diri, Mental, etis , dengan norma – norma yang telah dihimpun antara DPR dan presiden ternyata sudah tumbuh. Ketua DPR pada saat itu yaitu Sartono memberi saran kepada Sukarno agar meminta mandat kepada DPR untuk membuat perombakan pada struktur kenegaraan yang sesuai dengan UUD 1945 dan agar menjalankan program dari kabinet. Sartono juga meyakinkan presiden bahwasanya mandat tersebut akan diberikan, namun Sukarno menolaknya, ia hanya akan mengunjungi DPR untuk memberikan penjelasan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukanya untuk meminta mandat. Berarti hal ini membuktikan presiden tidak ingin dirinya terikat dengan DPR.

DPR dan presiden pun akhirnya mengalami konflik terbuka karena DPR menolak pemerintah tentang rencana anggaran belanja negara tahun 1960. Akhirnya pada tanggal 5 Maret 1960 terlihat sebuah dampak dari penolakan tersebut yaitu, presiden Sukarno membubarkan DPR. Lalu setelah itu Sukarno mendirikan kembali DPR gotong royong (DPR GR) . para anggota DPR-GR ini ditunjuk presiden tidak melalui dasar pertimbangan kekuatan partai politiknya, tapi berdasarkan pertimbangan lima golongan yaitu, nasional, Islam, komunis, kristen/katolik dan golongan fungsional. Sehingga anggota DPR-GR terdiri dari dua kelompok yang besar yaitu dari wakil-wakil partai dan golongan fungsional. Lalu pada 25 Juni 1960 dilakukanlah pelantikan anggota DPR-GR dengan tugas pokoknya yaitu melayani manipol, merealisasikan tentang amanat penderitaan rakyat. Kedudukan DPR-GR disini adalah untuk membantu presiden atau mandataris MPRS dan juga memberikan sumbangan tenaga ke presiden untuk menjalankan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh MPRS. Dibubarkanya DPR hasil pemilu mulanya menghasilkan reaksi dari berbagai golongan, antarlain pimpinan PNI dan NU. Pada awalnya tokoh NU keberatan atas pembubaran DPR ini dan juga mengancam untuk menarik semua calon anggotanya untuk DPR-GR. Namun sikapnya berubah saat jatah kursi NU pada DPR-GR ditambahkan. Namun, Aris Aam NU, K.H Wahab chasbullah, menyatakan NU tidak bisa duduk dengan PKI dalam suatu kabinet dan NU juga menolak kabinet nasakom dan juga menolak bekerja sama dengan PKI. Tokoh dari PNI yang juga menolak kebijakan Sukarno adalah sahabat Sukarno yaitu, Mr. Sartono dan Mr. Iskaq tjokroadisurjo. Sartono merasa

prihatin dengan perkembangan saat itu dan iskaq menyatakan kalau yang duduk di kursi DPR-GR ini bukan merupakan perwakilan dari PNI.

Antara DPR dan presiden ternyata sudah tumbuh. Ketua DPR pada saat itu yaitu sartono memberi saran kepada Sukarno agar meminta mandat kepada DPR untuk membuat perombakan pada struktur kenegaraan yang sesuai dengan UUD 1945 dan agar menjalankan program dari kabinet. Sartono juga meyakinkan presiden bahwasanya mandat tersebut akan diberikan, namun Seokarno menolaknya, ia hanya akan mengunjungi DPR untuk memberikan penjelasan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukanya untuk meminta mandat. Berarti hal ini membuktikan presiden tidak ingin dirinya terikat dengan DPR.

DPR dan presiden pun akhirnya mengalami konflik terbuka karena DPR menolak pemerintah tentang rencana anggaran belanja negara tahun 1960. Akhirnya pada tanggal 5 Maret 1960 terlihat sebuah dampak dari penolakan tersebut yaitu, presiden Sukarno membubarkan DPR. Lalu setelah itu Sukarno mendirikan kembali DPR gotong royong (DPR GR) . para anggota DPR-GR ini ditunjuk presiden tidak melalui dasar pertimbangan kekuatan partai politiknya, tapi berdasarkan pertimbangan lima golongan yaitu, nasional, Islam, komunis, kristen/katolik dan golongan fungsional. Sehingga anggota DPR-GR terdiri dari dua kelompok yang besar yaitu dari wakil-wakil partai dan golongan fungsional. Lalu pada 25 Juni 1960 dilakukanlah pelantikan anggota DPR-GR dengan tugas pokoknya yaitu melayani manipol, merealisasikan tentang amanat penderitaan rakyat. Kedudukan DPR-GR disini adalah untuk membantu presiden atau mandataris MPRS dan juga memberikan sumbangan tenaga ke presiden untuk menjalankan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh MPRS. Dibubarkanya DPR hasil pemilu mulanya menghasilkan reaksi dari berbagai golongan, antarlain pimpinan PNI dan NU. Pada awalnya tokoh NU keberatan atas pembubaran DPR ini dan juga mengancam untuk menarik semua calon anggotanya untuk DPR-GR. Namun sikapnya berubah saat jatah kursi NU pada DPR-GR ditambahkan. Namun, Aris Aam NU, K.H Wahab chasbullah, menyatakan NU tidak bisa duduk dengan PKI dalam suatu kabinet dan NU juga menolak kabinet nasakom dan juga menolak bekerja sama dengan PKI. Tokoh dari PNI yang juga menolak kebijakan Sukarno adalah sahabat Sukarno yaitu, Mr. Sartono dan Mr. Iskaq tjokroadisurjo. Sartono merasa prihatin dengan perkembangan saat itu dan iskaq menyatakan kalau yang duduk di kursi DPR-GR ini bukan merupakan perwakilan dari PNI. Mereka sudah tidak berhubungan lagi dengan PNI karena, mereka yang duduk di DPR-GR merupakan hasil dari penunjukan. Mereka yang menolak dalam rencana pembubaran DPR-GR menggabungkan diri mereka menjadi satu dinamakan liga demokrasi. Tokoh yang masuk atau terlibat pada liga demokrasi ini terdiri dari tokoh dari berbagai partai yaitu, tokoh partai Masyumi, NU, PSII, IPKI, Partai Katolik, dan PARKINDO dan beberapa panglima dari daerah tertentu yang memberikan dukungan. Liga demokrasi ini memberikan usulan penangguhan pembentukan untuk DPR-GR. Tapi liga demokrasi ini dibubarkan oleh presiden Sukarno.dalam melakukan penegakan demokrasi terpimpin, Sukarno melakukan tindakan membangun front nasional. Front nasional ini adalah lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan penetapan presiden no13 tahun 1959. Front nasional disebut sebagai organisasi yang memperjuangkan cita-cita yang terkandung pada UUD 1945 dan cita-cita proklamasi, lembaga ini diketuai langsung oleh bapak Sukarno.

Lalu presiden Sukarno melakukan langkah lainya yaitu regrouping kabinet yang berdasarkan ketetapan presiden No. 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi di negara dengan eksekutif. MPRS, DPR-GA, DPA, MAHKAMAH AGUNG dan juga DEWAN PERANCANG NASIONAL yang akan dipimpin langsung oleh Sukarno. Hal itu membuat pemimpin di lembaga-lembaga itu diangkat menjadi menteri dan ikut dalam beberapa sidang tertentu dan mereka ikut merumuskan juga mengamankan kebijakan pemerintah pada lembaga mereka. Tidak hanya itu, presiden Sukarno juga membentuk lembaga lagi bernama MPPR yaitu musyawarah pembantu pimpinan revolusi. Lembaga ini bertugas untuk membantu

pemimpin besar revolusi saat mengambil kebijakan khusus dan darurat yang bertujuan untuk menyelesaikan revolusi. Anggota pada lembaga ini meliputi beberapa Menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, beberapa departemen, angkatan dan para ketua partai nasakom. Pelaksanaan demokrasi terpimpin yang diketuai oleh Sukarno ini pertama kali mendapatkan penilaian oleh M.Hatta melalui tulisannya pada majalah Islam yaitu, "panji masyarakat" dengan judul "demokrasi kita". Ia memberikan kritiknya kepada Sukarno atas tindakannya, tugas-tugas DPR, sampai pada pengamatan adanya "krisis demokrasi", yaitu demokrasi yang tidak hanya terbatas sampai kemerdekaan lupa akan syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki yang semakin lama akan menjadi diktator.

Desain Perbaikan dan Penataan Lengkap terdiri dari Diagram tripola, yang mencakup desain perluasan kemajuan, desain dan desain klarifikasi kemajuan pembiayaan perbaikan. Desain Usaha Kemajuan Nasional yang Meluas Penataan tahap primer dilakukan pada tahun 1961-1969, perpanjangannya diperpendek dengan Penasbede. Penasbede kemudian disahkan oleh MPRS melalui Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan pelaksanaannya diberlakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961. Pada tahun 1963 Dinas Permasalahan Nasional digantikan dengan dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Khusus oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana kemajuan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun nasional lokal, serta mengawasi laporan pelaksanaan kemajuan, dan perencanaan dan evaluasi Wajib untuk MPRS. Pengaturan sanitasi yang diaktualisasikan oleh pemerintah berdasarkan Kontrol Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1959 yang sukses mengagumkan 25, 1959 pukul 06.00 pagi. Arah ini menunjukkan mengurangi jumlah uang beredar untuk tujuan peningkatan anggaran dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok uang kertas Rp. 500,00 dan Rp. 1.000,00 yang beredar pada saat pemberian sanksi harga arah diturunkan menjadi Rp. 50,00 dan Rp. 100,00. Pengaturan ini diikuti dengan rencana penguatan beberapa toko di bank harganya di atas Rp. 25.000,00 dengan maksud mengurangi jumlah uang tunai beredar. Pengaturan anggaran kemudian ditutup dengan Kontrol Pemerintah Penggantian UU No. 6/1959 yang sebagian besar substansinya adalah pengaturan itu parsel besar sebesar Rp. 1.000,00 dan Rp. Uang kertas 500,00 harus diperdagangkan dengan uang kertas yang belum terpakai senilai Rp. 100,00 dan Rp. 50,00 beberapa waktu baru-baru ini pada tanggal tersebut.

Keadaan semakin memburuk anggaran perbelanjaan yang cukup besar untuk infrastruktur serta untuk memenuhi ajang ide menyaingi negara adidaya dengan mengadakan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo). Bahkan dengan keadaan ekonomi yang tergolong cukup bermasalah presiden Soekarno tetap bermaksud melanjutkan misi dana revolusinya dan mengesampingkan stabilitas perekonomian. Kebijakan yang diterapkan mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi hingga mencapai 300% juga adanya pergantian pecahan uang yang biasa kita gunakan saat ini adalah 1000 rupiah diganti dengan 1 rupiah yang mengakibatkan uang - lama serta baru diiringi kenaikan harga pangan serta pada akhirnya meletuslah demonstrasi (Tritura)

## **B. Tulisan Yang Membahas Kontroversi Demokrasi Terpimpin**

Dalam hal ini juga berakhirnya masa demokrasi terpimpin tentu berpengaruh dalam penulisan Sejarah yang banyak membahas tentang keresahan juga mengungkap tentang Demokrasi terpimpin dari segi Akademis, Kritis maupun sebuah kepentingan. Penulisan yang pertama datang dari Chanifia Izza Millata dan Neneng Sobibatu Rohmah : PENYIMPANGAN DALAM MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965): KEKUASAAN PRESIDEN SOEKARNO YANG TAK TERBATAS . Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mempelajari keadaan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) khususnya terkait dengan kekuasaan Presiden Soekarno yang tak terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori kekuasaan dan teori kepemimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

beberapa penyimpangan selama masa Demokrasi Terpimpin, antara lain adanya pembentukan MPRS, kedudukan presiden yang tidak terbatas, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, pembentukan DPAS, pembentukan Front Nasional, dll. Sedangkan faktor-faktor penyebab adanya penyimpangan kekuasaan yang terjadi masa Demokrasi Terpimpin antara lain adalah masa kekuasaan presiden yang terbatas pada masa Demokrasi Parlementer dan pemikiran radikal Soekarno yang menganggap bahwa rakyat Indonesia yang sangat beragam harus dipimpin dengan cara pemusatan kepemimpinan agar dapat menyamakan pandangan dan tidak menimbulkan permasalahan dengan adanya perbedaan pendapat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyimpangan kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin bukan secara instan, namun merupakan buah pemikiran Soekarno sejak muda dan demokrasi terpimpin memberikan kesempatan bagi Soekarno untuk merealisasikan pemikirannya yang berujung pada adanya penyimpangan kekuasaan.

lalu tulisan lain yang membahas yaitu Gili argenti dan dini Sri istiningdias dengan judul "pemikiran politik Soekarno tentang demokrasi terpimpin". karya ini adalah hasil dari studi pemikiran sukarno, yaitu tentang konsep sistem demokrasi yang menurut penilaiannya adalah konsep politik yang mencirikhaskan tradisi budaya Indonesia. ia adalah pemikir nasionalis radikal (menurut tipologi pemikiran politik kebangsaan) yang dimana. minat ia pada politik sudah sangat besar sejak masih remaja. peran Sukarno yang aktif dalam dunia politik, dia sudah banyak sekali memberikan gagasan-gagasan ke dalam berbagai bentuk media seperti artikel, buku, dan juga pidatonya. pemikiran politiknya tentang demokrasi terpimpin adalah salah satu pemikirannya yang sangat kontroversial bahkan sampai saat ini masih mengundang polemik.

lalu ada juga tulisan oleh luluq Istiqomah, Henry Susanto, dan rinaldo Aldi Pratama yang berjudul "orientasi bernegara republik Indonesia periode 1959-1965". tulisan ini berisi tentang kegagalan sistem politik yang dibuat Sukarno yaitu demokrasi liberal yang malah membuat pemerintahan Indonesia menjadi tidak stabil. Sukarno mengadopsi sistem ini dari salah satu sistem yang berlaku di Belanda. karena hal itulah Indomaret dianggap belum bisa sepenuhnya lepas dari kolonialisme dan imperialisme yang menjadikan presiden Sukarno pada saat itu mencari cara untuk menangani demokrasi liberal dan mencari jalan lain dalam melaksanakan kehidupan bernegara Indonesia yang tidak terkait dengan kolonialisme dan imperialisme. setelah Demokrasi liberal mengalami kegagalan, munculah demokrasi terpimpin atas respon tersebut yang tadinya negara berpandang kepada Belanda menjadi berkiblat ke negara cina. Sukarno yakin bahwa sistem ini yang menjadi solusi untuk modernisasi Indonesia dikala bergejolaknya perang dingin yang terjadi antara uni Soviet dengan amerika serikat. jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasannya, penulis berpendapat bahwa sukarno adalah presiden yang sangat anti dengan kolonialisme dan imperialisme karena perilaku politiknya Sukarno yang berkembang dari aspek eksternal dan saat Sukarno berkunjung ke cina ia mendapatkan inspirasi. dari kegagalanya sistem demokrasi liberal, sukarnopun mengganti sistem menjadi Demokrasi terpimpin dan nasakom yang diinspirasi dari cina untuk menjawab kegagalan dari demokrasi liberal ini. namun hal itulah yang malah menambah keterpurukan Indonesia, mulai dari Indonesia yang mengalami keterasingan di dunia internasional lalu ekonomi Indonesia yang kita memburuk, serta terjadinya peristiwa G30S PKI yang menjadi sebab lengsernya sukarno. Juga masih banyak tulisan lainnya tentang demokrasi terpimpin seperti: DEMOKRASI TERPIPMPIN DALAM PEMIKIRAN DAN PRAKTIK POLITIK, Anwar Usman, Segittiga Kekuasaam Demokrasi Terpimpin Tahun 1959 – 1965: SSoekarno, TNIAD dan Partai Komunis Indonesia, dan Lainnya.

### **C. Analisa kontroversi demokrasi terpimpin dalam buku teks**

Analisa diawali dari gaya penulisan demokrasi terpimpin yang seolah-olah menjadi obat dalam perkembangan negara Indonesia sedikitnya kejanggalan yang terjadi seperti kekuasaan otkratis yang menimbulkan terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden Soekarno dalam penulisan ini memfokuskan penulis terhadap kebesaran Soekarno pada

masa demokrasi terpimpin yang merupakan sebuah Anugerah juga sekaligus sebuah Dilema dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang berakhir pada jatuhnya Soekarno dengan ditandai oleh peristiwa besar yakni penculikan para jenderal

a. Demokrasi Terpimpin sama dengan Presiden seumur hidup

Demokrasi terpimpin ini adalah hasil dari demokrasi Parlemerter yang dianggap tidak cocok jika di tetapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan karakteristik bangsa. Demokrasi ini disebut demokrasi terkelola merupan istilah pemerintahan demokrasi dengan meningkatkan otokrasi. Dampak yang sangat signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan atau diatur oleh suatu negara lewat efektivitas cara kerja demokrasi itu sendiri. Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwa Demokrasi Terpimpin diawali dengan Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan hal ini merupakan upaya untuk mencari jalan keluar dari kecaman politik dan untuk membuat Konstituante yang lebih kuat lagi kedepannya. Dalam hasil Pemilu 1955 dibubarkan dan peran penting politik parlemen tidak bisa berjalan sepenuhnya. Dalam UUD 1945 juga menentukan bahwa seorang presiden mengatur bahwa sekurang-kurangnya 5 Tahun untuk dipilih kembali, namun MPRS kembali mengangkat IR. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dari sini awal mulanya masalah karena bertentangan dengan UUD 1945 dan dari sini jugalah awal mulanya terjadinya penyimpangan Demokrasi Terpimpin dimulai.

b. Pembentukan MPRS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Pembubaran DPR & Pembentukan Front Nasional

Dalam perkembangannya berbagai kebaruaran yang sebetulnya merupakan upaya untuk memperbaiki suatu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia Namun terasa seperti suatu strategi yang sangat rapih yang ada didalamnya untuk memanifestasikan pemikiran seorang revolusioner yaitu bung karno yaitu :

1. Membentuk MPRS dengan berlandaskan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959, hal ini merupakan suatu masalah karna bertentangan dengan UUD 1945 karena MPRS harus dipilih berdasarkan PEMILU, Menurut Bung Karno MPRS sama dengan lembaga pemerintahan negara yaitu sebagai sebuah alat revolusi untuk menyuarakan hak rakyat dan membentuk pemerintahan yang adil serta makmur.
  2. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dibentuk dengan berlandaskan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 dan DPAS lebih dahulu disusun melalui MPRS.
  3. Membubarkan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat dari hasil pemilu 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran terhadap DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk dewan perwakilan rakyat gotong royong atau DPR GR yang di mana semua anggotanya ditunjuk oleh Presiden peraturan DPR GR juga ditentukan oleh Presiden sehingga DPR GR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah termasuk kebijakan presiden tugas DPR GR adalah sebagai berikut yang pertama melaksanakan manifesto politik yang dua yang kedua mewujudkan amanat penderitaan rakyat
  4. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 13 tahun 1959 yang merupakan sebuah organisasi pemerintahan dalam bidang Building Block tugasnya untuk memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Proklamasi mencakup golongan Nasionalis, Komunis, Agama Agama (NASAKOM) Lembaga-lembaga diatas ini di bentuk dan diketuai oleh Presiden Soekarno.
- c. Politik Demokrasi Terpimpin
- Pada pada saat itu partai bisa menggunakan kegiatan politik dengan bebas, yaitu pada masa setelah RIS dibubarkan saat sistem politik Indonesia menggunakan sistem demokrasi parlementer. namun kedudukan partai menjadi berkurang ketika beranjak kemas demokrasi terpimpin hal ini disebabkan adanya penetapan presiden (PP) no 7 tahun 1959 yang isinya menyebutkan jika partai memiliki anggota sedikit, maka harus dibubarkan. pada masa itu jumlah partai berkurang lebih dari 50% yang tersisa hanya 11 partai saja. kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pergerakan partai dan menguatkan kedudukan

presiden. fungsi dari hadirnya parpol bukan untuk mengisi atau mengikuti perebutan kursi di pemerintahan, melainkan untuk kekuatan penopang bagi presiden, partai komunis Indonesia dan angkatan darat. pada saat itu Indonesia mengalami penyimpangan politik bebas aktif yang membuat Indonesia menjadi lebih condong kepada salah satu poros. konfrontasi politik yang dilakukan Indonesia ini dianggap sangat mengarah kepada negara-negara di barat dan Amerika.

pandangan tentang new emerging force (NEFO) dan old established force (OLDEFO) menjadi landasan pandangan dari politik konfrontasi ini. NEFO ini adalah negara-negara berkekuatan baru yang muncul dan mereka anti dengan kolonialisme dan imperialisme. sedangkan OLDEFO ini adalah negara-negara yang memiliki kekuatan yang sudah lama dan mapan, mereka adalah negara penganut NEKOLIM (Neokolonialisme dan imperialisme). untuk membuat Nefo berjalan lalu pada saat itu dibentuklah poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang. karena dibentuknya poros inilah membuat ruang gerak Indonesia di forum internasional terbatas, karena berpedoman kepada negara yang menganut sistem komunis. pada masa ini juga ada istilah DWIKORA atau Dwi komando rakyat. istilah ini muncul saat Indonesia menolak pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai negara bonekanya barat, hal ini dianggap akan membahayakan negara Indonesia dan juga negara-negara Nefo lainnya.

Sukarno juga menjalankan politik mercusuar karena ia beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang dapat menuntun Nefo ke seluruh dunia. banyak sekali proyek-proyek yang megah dan spektakuler diselenggarakan di Indonesia guna untuk mewujudkan politik mercusuar ini. pemerintah mengharapkan Indonesia dapat menempatkan diri di tempat yang terkemuka di antara negara Nefo. salah satu proyek yang dijalankan Indonesia adalah Games of the New Emerging Forces (GANEF), proyek ini menghabiskan dana bermiliar-miliar karena pembangunan yang sangat besar. lalu pada 7 Januari 1965, Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap PBB. karena hal inilah Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. tidak hanya itu, Indonesia juga memasuki organisasi gerakan non blok. gerakan non blok ini adalah gerakan persaudaraan pada negara asia-afrika yang dimana kegiatan politik negaranya tidak terikat dengan kekuatan blok barat ataupun blok timur. pusat pergerakan gerakan ini adalah kemerdekaan bangsa asia-afrika juga mencegah bertambah luasnya perang dingin antara blok barat dan timur. dilihat dari terlibatnya Indonesia pada gerakan non blok ini, menandakan pergerakan politik Indonesia di internasional sudah cukup baik. gerakan non blok ini juga adalah gerakan yang bebas untuk mendukung perdamaian. Indonesia menganggap gerakan non blok ini sebagai sebuah revitalisasi dan pancaran dari UUD1945 baik itu skala nasional ataupun internasional.

## KESIMPULAN

Pada masa demokrasi terpimpin yang secara Bahasa dapat kita pahami suatu kegagalan dari Demokratisasi dan juga kepemimpinan yang terpusat memiliki berbagai problematika yang dapat kita pelajari di masa kini. Persoalan buku teks yang menjunjung tinggi obyektifitas dalam penulisannya serta kepentingan Nasionalisme didalamnya memiliki sedikit kekurangan dalam penegasan dalam merekonstruksi masa yang lalu, Demokrasi terpimpin yang diawali dengan berbagai narasi yang membuat kagum nan gundah seakan menutupi kontroversi demokrasi yang terjadi. Penyimpangan yang dilakukan Presiden Soekarno selaku inisiator dan revouisioner bangsa Indonesia yang cukup terlihat dirasa menjadikannya sosok yang kuat hingga menjadikannya lupa bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang beragam nan besar serta didominasi oleh kaum Nasionalis dan Islamis. Dengan niat yang cukup baik presiden Soekarno berusaha menjadikan Demokrasi terpimpin sebuah zam – zam bagi bangsa ini namun semua itu seakan tertutup akan Otokrasi dan Dominasi yang kokoh oleh Presiden Soekarno saat itu.

Analisis 5W+1H dari Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno

What : Demokrasi Terpimpin sebuah Solusi atau sebuah Ilusi ?

Who : Soekarno, TNI/ABRI, DPR-GR

Where : Indonesia

When : Tahun 1959 – 1965

Why : Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno atas dasar Solusi bagi permasalahan bangsa pada saat itu

How : Demokrasi Terpimpin yang menjadi Solusi dari system parlementer sebelumnya ternyata dijadikan sebuah kesempatan bagi presiden Soekarno dalam melakukan berbagai kepentingan serta penyimpanangan yang seharusnya tidak dilakukan bagi sang Revolusioner

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurakhman., Pradono, A., Sunarti, L., & Zuhdi, S. (2018) SEJARAH INDONESIA. Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.

### Jurnal

Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14-14.

Iqbal, M. (2011). ISU DASAR NEGARA INDONESIA MENJELANG PEMILU 1955: Studi Kasus Pidato Politik Soekarno Di Amuntai 27 Januari 1953. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2).

Istiqomah, L., Susanto, H., & Pratama, R. A. (2021). Orientasi Bernegara Republik Indonesia Periode 1959-1965. *Journal of Social Science Education*, 2(2), 65-72.

Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1).

Millata, C. I., & Rohmah, N. S. (2023). Penyimpangan Dalam Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Kekuasaan Presiden Soekarno yang Tak Terbatas. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)*, 20(2), 268-286.

Rohmah, N. S., & Millata, C. I. (2023). MAHASISWA DAN POLITIK; Telaah atas Gerakan Reformasi Mahasiswa Indonesia Tahun 1998. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)*, 20(2), 237-252.

Sulistiyono, Alfian. (2016). Persepsi Siswa Terhadap Materi Sejarah yang Bersifat Kontroversi dalam Membentuk Penalaran Kritis Siswa di SMA Negeri 1 Pekalongan. *Semarang. Indonesian Journal of History Education* 4 (1).

Indrajaat, Himawan. (2016). DEMOKRASI TERPIMPIN SEBUAH KONSEPSI PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 18 (1).

Primawati, Anggraeni. (2019). Sosiologi Perilaku Menyimpang. *Buku Materi Pokok*. Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.